



Kebijakan Moneter dan Fiskal Kunci Pengendalian Inflasi

YOGYA, TRIBUN - Kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dan responsif terhadap dinamika ekonomi menjadi kunci pengendalian inflasi yang juga mendukung pertumbuhan ekonomi.

Wakil Gubernur DIY, KG-PAA Paku Alam X yang membacakan sambutan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah DIY di Hotel Royal Ambarukmo, Selasa (27/2), mengatakan, ketersediaan pasokan yang cukup dan kelancaran distribusi pangan merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas harga dan mencegah inflasi. "Butuh kerja sama antara pemerintah, produsen, dan distributor untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi," katanya.

Di tengah dinamika ekonomi global, DIY telah menunjukkan kemampuannya dalam

mengelola inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penurunan inflasi dari 6,49 persen pada tahun 2022, menjadi 3,17 persen di 2023, dan pencapaian deflasi sebesar -0,02 persen di awal 2024, adalah bukti nyata dari keberhasilan kebijakan dan upaya bersama.

Pihaknya turut menyoroti isu harga dan ketersediaan beras yang kini menjadi perhatian masyarakat. Diperlukan upaya-upaya jangka pendek dan jangka panjang, guna mengantisipasi dan mengendalikan stok beras di sisi hulu dan hilirnya. Selain kebijakan moneter dan fiskal, pengendalian inflasi kelompok *volatile food* dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, dan bawang penting untuk mencapai stabilitas perekonomian menjelang HBKN di DIY.

"Selanjutnya, memperku-

at ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas dan hilirisasi pangan. Memperkuat ketersediaan data pasokan pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi, dan juga memperkuat sinergi TPI Pusat, TPID DIY dan TPID kabupaten/kota," paparnya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, Ibrahim, menerangkan, perlu langkah mitigasi yang bersifat *seasonal*. Langkah pertama, dengan mengedukasi masyarakat untuk belanja bijak dan meminimalkan *food waste*. Selanjutnya, memperkuat kerja sama antardaerah intraprovinci untuk panen raya beras yang diperkirakan berlangsung pada bulan Maret.

"Kita juga bisa meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha terkait harga jual yang wajar dan pola distribusi yang lancar," terangnya. **(maw)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005